

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, "Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika", Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Pemalsuan", Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, "Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia", Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "Kamus Istilah Hukum", Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris". Surabaya: PT. Refika Aditama, 2017.
- _____, "Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)", Cetakan ke I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____, "Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik", Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muhammad Lutfan Hadi Darus, "Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaris", Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Sumur Bandung, Bandung, 1982.

- Paulus Effendi Lotulung, "Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi", Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993.
- Philipus M. Hadjon, "Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)", Yuridika, Surabaya, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.
- _____, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- _____, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Subekti, "Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita", Jakarta, 1987.
- _____, "Hukum Perjanjian, Intermasa", Jakarta, 2005.
- R. Soegondo Notosoedirjo, "Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Tresna, "Komentar HIR", Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Salim HS, "Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)", Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suyanto, "Metode Penelitian Hukum", Unigres Press, 2022.
- Tobing, G.H.S Lumban. "Peraturan Jabatan Notaris". Jakarta: Erlangga, 1992.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, "Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial", Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, "Azaz-Azaz Hukum Perjanjian", Sumur, Bandung, 1989.

JURNAL

Edrick Kangagung, Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta”, Universitas Surabaya, Surabaya, 2021.

Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2021.

Husaini, “Jurnal Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019)”, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2021.

Marchelina Rante, Hernita Matana, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat”, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja, 2021.

Risky Amalia, Musakkir, Syamsuddin Muchtar, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Vitto Odie Pananda, Ghasham Anand, “Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu”, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

SKRIPSI-SKRIPSI

Ida Nurkasanah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.

Muh. Ikhsan Kurniawan, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Akta Jual Beli) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar, Makassar, 2022.

M. Zuhdi Anhar, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Penghadap”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020.

MEDIA DARING

<http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmarking//>, diakses tanggal 3 Maret 2022.

<http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris//>, diakses tanggal 22 April 2022.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/jaksa-cokok-Notaris-pemalsu-akta-perjanjian-kerjasama-di-pekanbaru.html//>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022